

**SUMBER KONFLIK DAN POTENSI PENERAPAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN KONFLIK (APK)
DALAM SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP: KASUS SENGKETA ANTARA
MASYARAKAT SOSORLADANG DENGAN PT. INTI INDORAYON UTAMA/
PT. TOBA PULP LESTARI DI KECAMATAN PORSEA
KABUPATEN TOBA SAMOSIR, SUMATERA UTARA**
*(Conflict Sources and the Potential of Alternative Dispute Resolution (ADR)
Application on Environmental Conflict: The Case of Sosorladang Community and PT
Inti Indorayon Utama/PT. Toba Pulp Lestari at Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba
Samosir, North Sumatera Province, Indonesia)*

Tua Hasiholan Hutabarat
Program Studi Ilmu Lingkungan
Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

Abstrak

Penelitian ini mengkaji konflik lingkungan yang terjadi antara masyarakat Porsea dengan PT. Inti Indorayon Utama (IIU). Konflik ini terjadi berkepanjangan karena tidak bertemunya faktor-faktor rasional dan irasional. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana factor-faktor yang irasional bekerja dalam penyelesaian konflik melalui Alternative Dispute Resolution (ADR). Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif melalui survai baik dengan kuesioner maupun interview. Penelitian ini menemukan bahwa dari 4 faktor rasional yang dipertimbangkan dalam penyelesaian konflik hanya faktor penerimaan bantuan yang berkorelasi dengan pengembangan sikap masyarakat. Adapun faktor-faktor irasional memiliki relasi, dan faktor etnosentrik menjadi faktor yang paling berpengaruh.

Kata kunci: konflik, ADR, faktor rational dan irrasional

Abstract

This research was carried out based on an environmental conflict phenomenon between Porsea people, especially Sosorladang, and PT Inti Indorayon Utama or Toba Pulp Lestari (PT IIU/TPL). Occured four years, the conflict is difficult to resolve due to some irrational factors aside from rational ones that should have made the conflict resolution realistic. The research aims to identify how the nonrealistic conflict influences an unfeasibility of solution through an approach of Alternative Dispute Resolution (ADR). The method used was a combination of survey and descriptive approaches. The main means of data collection is questionnaire supported by in-depth interview and direct field observation, including the company environment. Data derived from questionnaire and interview were analyzed by examining their correlation. The result of the correlation test show that among four rational factors considered, only aid acceptance factor that has relation in building up the societal attitude. The irrational factors prove a real relationship, and the ethnocentric factor become the most influential factor. It is proven that the conflict between the inhabitant and company is due to a nonrealistic factor.

Key words: conflict, Alternative Dispute Resolution (ADR), rational and irrational factors

I. PENGANTAR

Latar Belakang Penelitian

Sektor industri merupakan salah satu sektor yang dibutuhkan bagi pembangunan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia mendorong tumbuhnya berbagai industri skala besar di beberapa kawasan, termasuk industri yang memproduksi *pulp* dan *rayon*. Salah satu perusahaan yang memproduksi *pulp* dan *rayon* di Indonesia adalah PT Inti Indorayon Utama (PT IIU) yang pada saat ini berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) di Sosorladang, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir.

Sebagai sebuah industri yang tergolong *high polluted industry* aktifitas PT IIU/TPL banyak mendapat penentangan dari masyarakat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat. Konflik antar perusahaan dan masyarakat yang didukung oleh organisasi-organisasi yang *cocern* pada lingkungan hidup selalu muncul. Masyarakat menilai keberadaan perusahaan di Sosorladang telah menyalahi aspek tata ruang sehingga menimbulkan ancaman terhadap alam di Sosorladang dan khususnya di sekitar kawasan Danau Toba.

Selain itu, keberadaan PT IIU/TPL di Porsea dianggap tidak memiliki dampak positif bagi masyarakat. Kebijakan-kebijakan pihak perusahaan bersifat arogan dengan tidak memperhatikan eksistensi budaya dan kesejahteraan masyarakat lokal. Ada 4 (empat) kesalahan yang telah teridentifikasi menjadi landasan penolakan masyarakat. Pertama, kesalahan lokasi pabrik, kedua, dampak pencemaran pabrik pada lingkungan, ketiga, arogansi manajemen perusahaan, dan keempat, fenomena penurunan permukaan Danau Toba (Ozon, 2001).

Selain keempat tuduhan tersebut, perusahaan juga dipersalahkan sebagai penyebab isu-isu

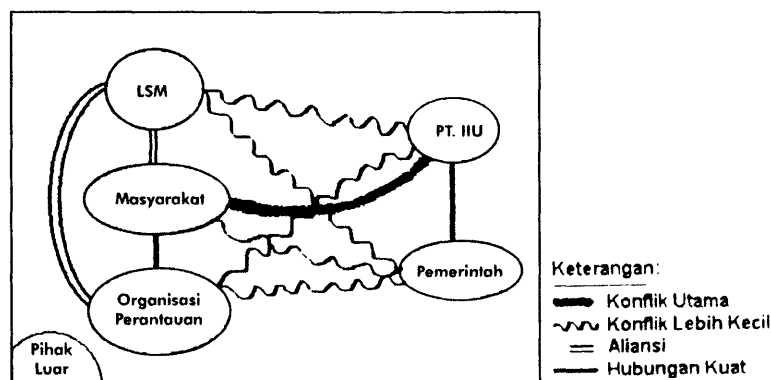
munculnya generasi Batak yang kerdil dan keterbelakangan mental (Realita Pos, 1998:1), pelanggaran HAM (Sinar Indonesia Baru, 1998: 1), praktek manipulatif perusahaan (Gema Reformasi, 1998: 3) dan beberapa pelanggaran lain yang mengakibatkan jatuhnya korban di kalangan masyarakat.

Kerusakan lingkungan, minimnya manfaat yang diberikan kepada masyarakat, manipulasi pihak perusahaan, munculnya konflik horizontal dan kerugian yang dialami masyarakat kemudian memunculkan perlawanan penolakan masyarakat terhadap PT IIU/TPL. Puncaknya adalah pada tahun 1998, ketika reformasi di Indonesia berlangsung, perlawanan masyarakat mencapai titik paling radikal yang memaksa pemerintah menutup operasional perusahaan sementara pada tahun 1999.

Berbagai penelitian dan dialog ilmiah pun berlangsung untuk membahas aspek lingkungan dan sosial budaya dari keberadaan PT IIU/TPL sebagai upaya mengoperasikan kembali perusahaan. Usaha-usaha tersebut ternyata mengalami kegagalan. Pihak-pihak yang terlibat konflik tidak menemukan kata sepakat tentang akar konflik dan strategi penyelesaian yang paling tepat.

Masing-masing pihak bertahan dengan argumentasi yang saling bertolak belakang sehingga pada akhirnya menjadikan konflik menjadi lebih kompleks dan bertambah kabur. Walaupun pernah diterapkan beberapa pendekatan dalam penyelesaian konflik, namun sampai saat penelitian ini dilakukan pendekatan tersebut sulit untuk diterapkan bahkan mendapat penolakan keras dari masyarakat.

Pendekatan yang paling relevan dalam penyelesaian konflik lingkungan sebenarnya adalah pendekatan Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Konflik (APK).



Gambar 1. Peta Konflik

**SUMBER KONFLIK DAN POTENSI PENERAPAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN KONFLIK (APK)
DALAM SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP: KASUS SENGKETA ANTARA
MASYARAKAT SOSORLADANG DENGAN PT. INTI INDORAYON UTAMA/
PT. TOBA PULP LESTARI DI KECAMATAN PORSEA
KABUPATEN TOBA SAMOSIR, SUMATERA UTARA**
*(Conflict Sources and the Potential of Alternative Dispute Resolution (ADR)
Application on Environmental Conflict: The Case of Sosorladang Community and PT
Inti Indorayon Utama/PT. Toba Pulp Lestari at Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba
Samosir, North Sumatera Province, Indonesia)*

Tua Hasiholan Hutabarat
Program Studi Ilmu Lingkungan
Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

Abstrak

Penelitian ini mengkaji konflik lingkungan yang terjadi antara masyarakat Porsea dengan PT. Inti Indorayon Utama (IIU). Konflik ini terjadi berkepanjangan karena tidak bertemunya faktor-faktor rasional dan irasional. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana faktor-faktor yang irasional bekerja dalam penyelesaian konflik melalui Alternative Dispute Resolution (ADR). Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif melalui survai baik dengan kuesioner maupun interview. Penelitian ini menemukan bahwa dari 4 faktor rasional yang dipertimbangkan dalam penyelesaian konflik hanya faktor penerimaan bantuan yang berkorelasi dengan pengembangan sikap masyarakat. Adapun faktor-faktor irasional memiliki relasi, dan faktor etnosentrik menjadi faktor yang paling berpengaruh.

Kata kunci: konflik, ADR, faktor rasional dan irasional

Abstract

This research was carried out based on an environmental conflict phenomenon between Porsea people, especially Sosorladang, and PT Inti Indorayon Utama or Toba Pulp Lestari (PT IIU/TPL). Occured four years, the conflict is difficult to resolve due to some irrational factors aside from rational ones that should have made the conflict resolution realistic. The research aims to identify how the nonrealistic conflict influences an unfeasibility of solution through an approach of Alternative Dispute Resolution (ADR). The method used was a combination of survey and descriptive approaches. The main means of data collection is questionnaire supported by in-depth interview and direct field observation, including the company environment. Data derived from questionnaire and interview were analyzed by examining their correlation. The result of the correlation test show that among four rational factors considered, only aid acceptance factor that has relation in building up the societal attitude. The irrational factors prove a real relationship, and the ethnocentric factor become the most influential factor. It is proven that the conflict between the inhabitant and company is due to a nonrealistic factor.

Key words: conflict, Alternative Dispute Resolution (ADR), rational and irrational factors

Pendekatan tersebut adalah yang paling fleksibel dan dapat mengakomodasi berbagai kepentingan, sehingga akan menghasilkan kesepakatan penyelesaian yang saling menguntungkan (win-win solution) antar pihak yang berkonflik.

Sebelum pendekatan ADR/APK diterapkan, maka penelitian holistik yang berusaha melihat faktor-faktor (rasional dan irasional) yang menjadi penyebab konflik perlu dilakukan. Faktor-faktor tersebut kemudian dihubungkan pendekatan ADR/APK untuk melihat kemungkinan penyelesaian konflik.

Permasalahan

1. Apakah faktor rasional dan irasional mempengaruhi pembentukan sikap negatif masyarakat terhadap perusahaan?
2. Variabel manakah di antara faktor rasional dan irasional yang paling mempengaruhi pembentukan sikap negatif masyarakat terhadap perusahaan?
3. Apakah konflik antara masyarakat dengan perusahaan bersifat realistis atau nonrealistis?
4. Apakah faktor rasional dan irasional mempengaruhi kemungkinan diterapkannya Alternatif Penyelesaian Konflik (APK)?
5. Apakah dengan sikap negatif masyarakat Desa Sosorladang terhadap perusahaan memungkinkan untuk diterapkannya mekanisme Alternatif Penyelesaian Konflik (APK) dalam penyelesaian konflik antara masyarakat Desa Sosorladang dengan perusahaan?

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan ekonomi khususnya di negara-negara dunia ketiga (termasuk Indonesia) kemudian harus dibayar mahal dengan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan kemudian diperparah oleh masuknya dirty industry, yakni industri yang memiliki kadar intensitas polutan yang relatif tinggi (Abimanyu dan Poppy, 1995: 12) melalui kebijakan-kebijakan pembangunan di negara-negara dunia ketiga semata-mata bagi kebutuhan pertumbuhan ekonomi. Ironisnya elemen masyarakat yang paling sering menderita akibat pembangunan ekonomi adalah masyarakat lokal. Potensi dinamika pola pertanian tindakan kolektif (collective action) (Rachbini, 1990: 79), kehidupan harmonis dengan alam (Kusumaatmadja, 1995:

412), sifat yang belum tersentuh dan terjangkau kemajuan (Rahail, 1995: 417) dan produktivitas pertanian berintegritas ekosistem (Mitchell, 2000: 300) sedang mengalami ancaman dari organisasi industri modern yang tamak akan sumber daya alam.

Dampak dari kebijakan yang tidak populis dari pemerintah dan industri yang mengeksploitasi sumber daya hutan adalah melahirkan resistensi pada masyarakat lokal (Ghai, 1994: 4). Kombinasi kekuatan pemerintah yang mendorong modernisasi telah menggiring masyarakat pada kerusakan tatanan sosial dan ekologi (*sosial and ecological extinction*). Hutan milik masyarakat asli (*indigenous people*) telah dieksploitasi oleh perusahaan perambah (*logging company*) luar, maupun domestik yang kemudian melahirkan relokasi dan pengusiran masyarakat asli. Reduksi sumber daya alam mengakibatkan ketidakterjaminan dan kemiskinan, yang akhirnya menurut Colchester (1994: 78-79) membentuk keterasingan (*alienation*) masyarakat pada sumber daya hutan.

Secara lebih luas Dixon (1991 3-4) mengungkapkan bagaimana degradasi dan pengurangan pada lingkungan mengakibatkan konflik dalam masyarakat. Ada 6 (enam) tipe perubahan lingkungan yang dapat memicu terjadinya konflik, yaitu:

1. efek rumah kaca (*greenhouse effect*) dan perubahan iklim (*climate change*)
2. kerusakan ozon stratosfer
3. degradasi dan kehilangan lahan pertanian produktif
4. degradasi dan perambahan hutan
5. pengurangan dan polusi supply air; dan
6. hilangnya sumber tangkapan ikan

Kegiatan pembangunan yang disponsori oleh pemerintah dan penanaman modal besar telah meminggirkan hak dan memutuskan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya alam. Pemutusan hak lokal pada alam dan kontrol masyarakat pada sumber inilah yang menjadi akar perlawanan atau konflik sosial (Ghai, 1994: 5).

1. Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Sistem hukum Indonesia mengenal mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan, yang merupakan terobosan baru guna menampung banyaknya kasus-kasus sengketa lingkungan yang tidak dapat diselesaikan, ataupun bila terselesaikan tidak

mengandung aspek keadilan. Sebagai undang-undang yang memayungi ketentuan hukum pengelolaan lingkungan hidup, telah diatur pada Pasal 30, Pasal 31, 32, dan 33 UUPLH No. 23 Tahun 1997 (Hardjasoemantri, 2000: 377-382). Pada pasal-pasal tersebut secara jelas mengatur sekaligus menjadi acuan bagi aturan-aturan hukum lainnya dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan. Ada dua mekanisme yang dapat ditempuh oleh masyarakat untuk mencari penyelesaian sengketa lingkungan hidup, yakni melalui proses pengadilan atau di luar pengadilan.

Sebenarnya ada tiga jalur penyelesaian sengketa yang lazim dijalankan dalam setiap negara, yakni penyelesaian sengketa di pengadilan (yuridis), mekanisme politis dan administratif. Pendekatan politis dilakukan oleh politisi melalui pertimbangan nilai dan kepentingan yang berbeda. Kemudian pendekatan administratif yang dilakukan melalui organisasi pengelolaan sumber daya yang secara resmi dibentuk dan memberikan kesempatan pada para birokrat untuk mengambil keputusan tentang suatu sengketa, dan yang terakhir adalah pendekatan yuridis atau hukum dilakukan melalui pengadilan (Mitchell, 2000: 367-368).

Pendekatan kontemporer dalam penyelesaian sengketa lingkungan saat ini adalah pendekatan alternatif penyelesaian konflik (APK) atau yang lebih dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Pendekatan ini merupakan alternatif terhadap kelemahan berbagai pendekatan penyelesaian sengketa lingkungan lain. Pendekatan penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan berlangsung dalam suatu proses formal beracara pada rangkaian persidangan (*judicial process*), sedangkan pendekatan APK merupakan kebalikannya yakni mengupayakan penyelesaian sengketa di luar institusi pengadilan (Yazid, 1995: 2).

Ada beberapa tipe pendekatan dalam APK, yakni mediasi, negosiasi, arbitrase, fasilitasi dan berbagai tipe lainnya. Inti pendekatan ini adalah menekankan pada terciptanya konsensus antara pihak-pihak yang bersengketa dengan bersama-sama memaksimalkan kemampuan menyusun suatu proses penyelesaian. Dengan kata lain, mekanisme konsensus dapat menghasilkan kesepakatan melalui tindakan bersama antar partisipan untuk kemudian menyadari berbagai aspek perbedaan tanpa ada perubahan hak suatu kelompok terhadap kelompok lain (Cormick, 1996: 4).

Mekanisme APK memiliki daya tarik khusus yang penerapannya membawa keuntungan. Margono (2000: 41-43) mengidentifikasi beberapa

karakteristik yang bersifat menguntungkan dalam penerapan APK.

1. Sifat kesukarelaan dalam proses
2. Prosedur yang cepat
3. Keputusan nonyudisial
4. Kontrol tentang kebutuhan organisasi
5. Prosedur rahasia (confidential)
6. Fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah
7. Hemat waktu
8. Hemat biaya
9. Pemeliharaan hubungan
10. Tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan
11. Kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil
12. Keputusan bertahan sepanjang waktu

Karakteristik-karakteristik tersebut merupakan suatu keuntungan sehingga pendekatan APK lebih memungkinkan dapat diimplementasikan dalam menyelesaikan sengketa lingkungan saat mekanisme legal formal mengalami kegagalan.

2. Landasan Teori

Penelitian ini didasarkan pada suatu realitas konflik yang tidak terselesaikan. Mengenai realitas konflik, Lewis Coser pada bukunya, "*The Functions of Social Conflict*", (dalam Johnson, 1990: 202) pembedaan antara konflik realistik dan konflik nonrealistik. Secara gamblang Coser (1956: 49) menjabarkan konflik realistik sebagai berikut:

"... *Conflicts which arise from frustration of specific demands within the relationship and from estimates of gains of participants, and which are directed at the presumed frustrating object, can be called realistic conflict ...*"

Pernyataan ini memiliki arti, konflik realistik adalah konflik yang muncul sebagai akibat dari kondisi frustrasi yang dialami oleh partisipan ketika tuntutan dari suatu hubungan tidak tercapai. Roy (dalam Burton, 1990: 126) menyatakan hal yang sama. Ia mendasarkan munculnya konflik dari perspektif kebutuhan dasar manusia (*basic human needs*). Ketika kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, maka akan muncul keadaan frustrasi maupun tertekan yang bersifat manifes. Jika keadaan tersebut berlanjut maka dapat mendistorsi perilaku ke arah konflik. Namun konflik nonrealistik adalah sebaliknya. Konflik nonrealistik adalah konflik yang sekedar bersifat antagonistik belaka, tanpa

terkait dengan isu yang mendasari konflik. Tentang konflik nonrealistik, Coser mengatakan:

Non realistic conflicts, on the other hand, although still involving interaction between two or more persons, are not occasioned by the rival end of the antagonist, but by the need for tension release of at least one of them. In this case the choice of antagonist depends on determinants, not directly related to a contentious issue and is not oriented toward the attainment of specific rules...

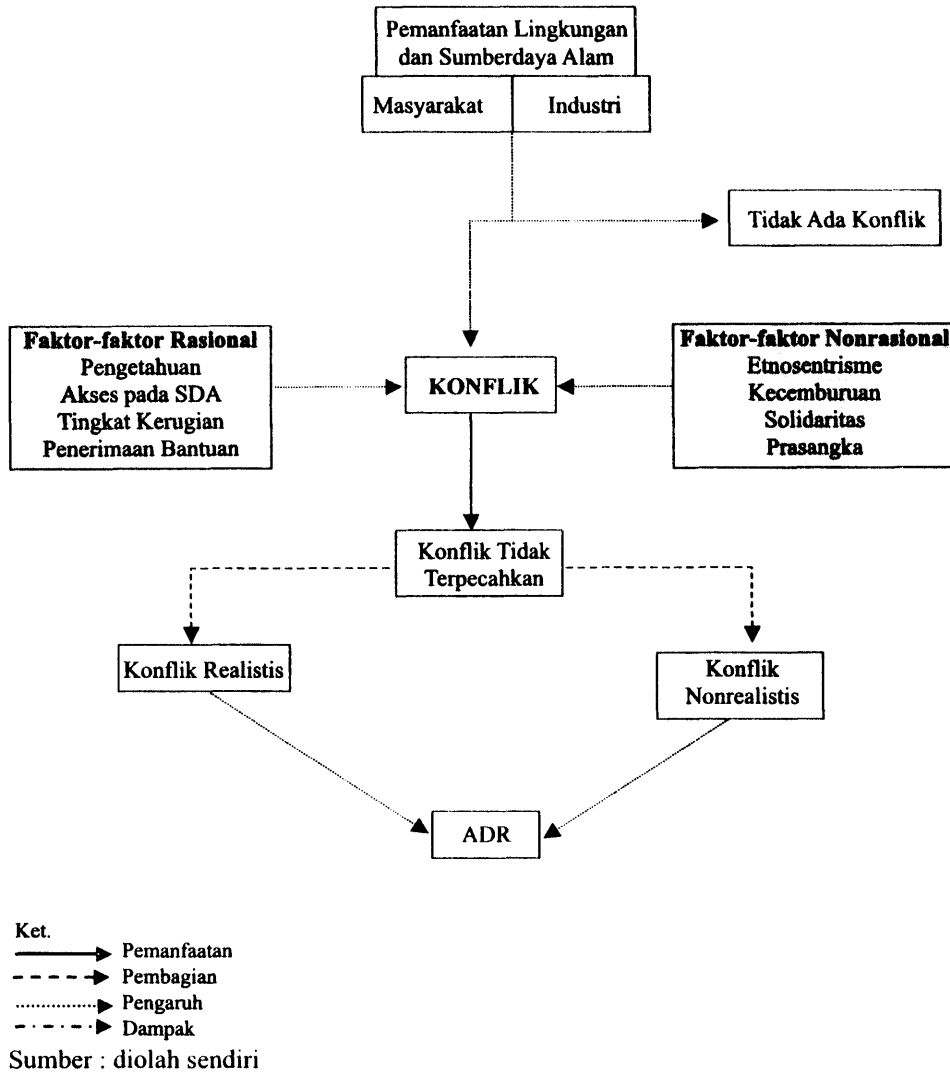
Perbedaan konflik realistik dan nonrealistik menurut Coser akan berdampak pada sifat pemecahannya. Konflik yang realistik diarahkan pada objek konflik, sedangkan konflik nonrealistik adalah konflik yang membelok dari objek konflik yang sebenarnya. Konflik yang nonrealistik lebih sulit untuk didefinisikan, tidak terkontrol, dan keluar dari isu yang sebenarnya (Folger dan Marshal, 1984: 6). Konflik akan cenderung bersifat realistik daripada nonrealistik jika kebenaran dari kepentingan-kepentingan yang bertentangan itu diterima secara eksplisit daripada diingkari. Saat kepentingan antar pihak yang berposisi diterima, maka terbuka kemungkinan untuk melakukan perundingan dan menekan perbedaan-perbedaan yang menjadi rangsangan utama perubahan sosial (Johnson, 1990: 202).

Faktor lainnya yang berpengaruh terhadap konflik nonrealistik adalah adanya karakter etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan suatu bentuk kesetiaan yang kuat dan tanpa kritik pada kelompok sendiri, disertai prasangka terhadap kelompok etnis atau bangsa lain. Masyarakat dengan karakter etnosentrisme yang tinggi akan menanamkan rasa nasionalisme dan menuntut loyalitas dan pengorbanan pada kelompok dalam, disertai dengan propaganda dan kampanye-kampanye yang memperkuat tingkat emosional kelompok (Johnson, 1996: 80-81).

Etnosentrisme yang tinggi dapat membentuk suatu sikap ketidakpercayaan terhadap kelompok *outgroup*. Kesadaran kolektif yang didasarkan oleh keseluruhan kepercayaan normatif dan kemudian diperkuat oleh adanya konflik akan semakin memperkental perasaan *ingroup-outgroup* dan mempertegas garis batas dengan kelompok lain. Jika keadaan tersebut dibiarkan tanpa adanya komunikasi, dan dibiarkan ditekan (*repressed*) dalam waktu lama maka seperti yang dikatakan Coser (dalam Johnson, 1990: 201), mengakibatkan dua hal. Pertama, dipendamnya konflik dapat

mengakibatkan putusnya hubungan, apalagi jika terjadi pada hubungan dengan keamatan emosional tinggi. Konflik seperti ini dapat menimbulkan meledaknya konflik secara tiba-tiba dan parah, dimana ketegangan dan permusuhan yang terakumulasi akan meledak dalam bentuk amukan keras. Kedua, adalah mengelakkan perasaan bermusuhan itu dari sumber yang sebenarnya, dan mengembangkan suatu saluran alternatif untuk mengungkapkannya yang disebut katup pengaman (*safety valve*). Ketiadaan mekanisme peredaman konflik tersebut akan memunculkan kekerasan dan menghancurkan struktur sosial.

Salah satu teori yang berkaitan dengan ketidakpercayaan adalah teori kesalah pahaman antar budaya. Pada teori ini diasumsikan bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. Pola penyelesaian kemudian diarahkan untuk menambah pengetahuan pihak-pihak yang mengalami *stereotype* negatif tentang pihak lain, dan meningkatkan keefektifan komunikasi antar budaya (Fisher, et al, 2000: 8). Dalam teori ini unsur *stereotype* memegang peranan penting menjadi penyebab munculnya konflik. Untuk itu dalam penyelesaiannya dijadikan fokus yang harus dipecahkan. *Stereotype* merupakan pandangan (*image*) umum suatu kelompok tentang kelompok lain atau tentang sejumlah orang (Johnson, 1996: 223). *Stereotype* sangat penting bagi pembentukan konflik, sebab menjadi dasar individu atau kelompok dalam memperlakukan orang lain. Interaksi antar kelompok banyak dipengaruhi oleh gambaran *stereotype* salah, akan memunculkan konflik. Unsur lain yang mempengaruhi terbentuknya konflik adalah faktor kecemburuan. Simanjuntak (2001: 239) menyatakan bahwa orang Batak Toba sangat dipengaruhi oleh budaya konflik. Budaya konflik tersebut muncul sehari-hari dalam bentuk kecemburuan antar sesama. Kecemburuan adalah nilai tradisional Batak Toba yang dikenal dengan nama: *late* (cemburu) dan *elat* (dengki). *Pengejawantahan* kecemburuan dan kedengkian diwujudkan dalam persaingan dengan cara perlombaan, pamer kekayaan, kepintaran atau keahlian dan kepongahan ketika bersaing tanpa kemampuan yang wajar. Karakter ini masih menguasai orang Batak Toba dan menurut Simanjuntak sebagai penyebab utama munculnya konflik.



Gambar 2. Kerangka Teoritis

III. CARA PENELITIAN

Penelitian ini mencoba melakukan pendekatan survey lapangan untuk menjelaskan fenomena konflik lingkungan antara masyarakat dengan PT. Inti Indorayon Utama. Sebagaimana halnya dengan penelitian survey, pengambilan data menggunakan kuesioner merupakan yang utama, ditambah dengan teknik wawancara mendalam (indepth interview), observasi dan dokumentasi. Penggabungan ini diupayakan dapat mengangkat permasalahan ke permukaan, untuk kemudian dianalisis secara kuantitatif, ditambah dengan analisis kualitatif.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Sosorladang, Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan, di desa inilah letak PT. IIU beroperasi, sehingga masyarakat desa ini yang paling merasakan dampak keberadaan PT. IIU.

2. Alat Penelitian

Alat pengumpulan data paling utama adalah menggunakan kuesioner kepada responden. Untuk mengisi kuesioner digunakan beberapa alat tulis berupa pensil oleh beberapa tenaga lapangan. Kemudian metode pengumpulan data kedua ada-

lah wawancara secara mendalam terhadap beberapa responden kunci, yakni kepada para tokoh masyarakat, pihak perusahaan, maupun kepada beberapa orang responden.

3. Kesulitan Penelitian

Ada beberapa kendala yang ditemui di lapangan, sehingga membuat proses penelitian tidak maksimal seperti yang direncanakan. Adapun kendala-kendala tersebut adalah:

1. Kondisi ketakutan dan traumatis masyarakat terhadap masa lalu
2. Minimnya data sekunder dari Desa. Dapat dikatakan administrasi Desa Pangombusan dan Tangga Batu I tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga data jumlah penduduk, monografi desa tidak diperoleh.

4. Unit Penelitian

Unit penelitian adalah kepala keluarga, disebabkan sistem kekerabatan Batak Toba yang bersifat patrilineal. Sistem patrilineal menjadikan seorang kepala keluarga (ayah) memiliki peran yang sangat dominan dalam mengambil keputusan, baik urusan internal keluarga maupun dalam hubungan sosial budaya.

5. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Sosorladang, Kecamatan Porsea berjumlah 120 KK. Berdasarkan jumlah kepala keluarga tersebut, maka diputuskan sampel sama dengan populasi. Pada saat penyebaran kuesioner, ternyata ditemui 25 KK menolak, atau hanya 95 orang yang bersedia mengisi kuesioner. Jumlah tersebut dinyatakan sudah mewakili populasi sehingga layak dijadikan sampel penelitian.

6. Cara Pengumpulan Data

Data primer yang diperoleh melalui kuesioner dilakukan secara langsung oleh tenaga lapangan,

dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh responden. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan jika diisi secara langsung oleh responden. Wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi dilakukan untuk memperoleh data kualitatif, seperti sikap, kelakuan, pengalaman, sifat khas dan harapan manusia (Vredenburg, 1978: 84). Alat yang digunakan dalam wawancara mendalam adalah panduan wawancara bersifat terstruktur, dan terbuka tak terstruktur.

7. Variabel Penelitian

1) Variabel Rasional

Adapun yang termasuk dalam variabel rasional dalam penelitian ini adalah:

1. Tingkat pengetahuan masyarakat
2. Akses terhadap sumber daya alam
3. Tingkat kerugian yang diterima masyarakat
4. Perolehan bantuan

2) Variabel Irasional

Beberapa variabel irasional dalam penelitian ini adalah:

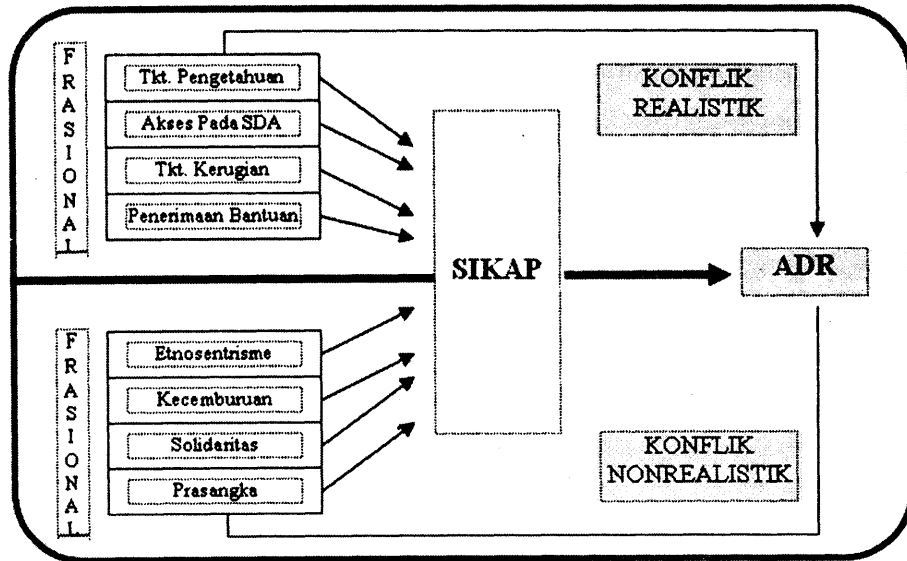
1. Etnosentrisme
2. Kecemburuan
3. Solidaritas
4. Prasangka

3) Sikap

Merupakan variabel terpengaruh (variabel dependen), sebagai akibat dari pengaruh variabel rasional dan irasional terhadap keberadaan perusahaan.

4) Alternatif Penyelesaian Konflik (APK)

Merupakan variabel terpengaruh (variabel dependen) sebagai akibat dari pengaruh variabel sikap.



Gambar 3. Kerangka Pemikiran Penelitian

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Yang Berhubungan dengan Pembentukan Sikap Masyarakat.

Beberapa faktor yang dianggap menjadi penyebab penolakan dan terbentuknya sikap negatif masyarakat terhadap PT IIU/TPL adalah adanya pemahaman atau pengetahuan masyarakat terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan perusahaan, terputus atau terbatasnya akses masyarakat pada sumberdaya alam, besarnya kerugian yang diderita masyarakat dan rendah atau minimnya bantuan atau kontribusi perusahaan terhadap masyarakat lokal.

Keempat faktor tersebut diidentifikasi memiliki hubungan dengan terbentuknya sikap negatif masyarakat terhadap PT IIU/TPL. Walaupun faktor rasional yang dijadikan dasar penolakan tersebut telah berdampak pada penutupan perusahaan, namun banyak pihak, termasuk pihak perusahaan, pemerintah dan beberapa konsultan independen masih dianggap bersifat indikatif. Artinya, dasar-dasar penolakan masyarakat terse-

but tidak memiliki bukti-bukti kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Masing-masing pihak yang bersengketa saling melontarkan argumentasi berdasarkan studi-studi yang pernah dilakukan. Selama beberapa tahun polemik berlangsung ternyata kata sepakat tentang faktor penyebab terbentuknya sikap negatif dan penolakan masyarakat tersebut tidak pernah tercapai. Pihak-pihak yang terlibat tetap bersikukuh pada prinsip dan alasan masing-masing.

Dikarenakan adanya polemik tersebut maka pada penelitian ini dilakukan uji terhadap faktor rasional tersebut untuk melihat kebenaran dari keempat faktor rasional yang diindikasikan menjadi dasar pembentukan sikap negatif masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis statistik dan data kualitatif berupa hasil wawancara mendalam terhadap beberapa responden ternyata dari empat faktor rasional yang diindikasikan menyebabkan sikap penolakan masyarakat, ternyata hanya faktor tingkat bantuan yang memiliki hubungan yang signifikan.

Sumber Konflik

Faktor-faktor yang selama konflik berlangsung dianggap mempengaruhi perlawanan masyarakat ternyata tidak terbukti. Salah satunya adalah faktor tingkat kerugian dan akses terhadap sumberdaya alam. Tanggapan dari masyarakat tentang intensitas kerugian merupakan salah satu bukti bahwasanya selama PT IIU/TPL beroperasi telah menyebabkan kerugian bagi masyarakat.

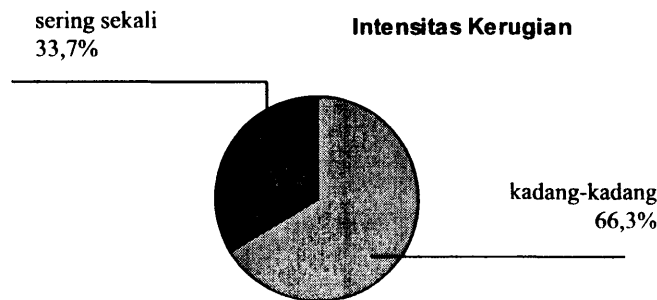
Masyarakat yang menyatakan bahwasanya operasional perusahaan telah menyebabkan kerugian dalam intensitas sering sekali hanya 33,7%, sedangkan yang memberi tanggapan kadang-kadang sebanyak 66,3%. Hal itu menunjukkan tidaklah selalu kegiatan PT IIU/TPL di Porsea menyebabkan kerugian bagi masyarakat, bahkan beberapa responden menyebutkan beberapa keuntungan yang diperoleh ketika perusahaan beroperasi. Kondisi serupa juga terjadi pada tanggapan masyarakat terhadap faktor akses pada

sumberdaya alam. Sebagian besar masyarakat menilai, sejak perusahaan beroperasi tidaklah terlalu berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang ada di sekitar tempat tinggal mereka, seperti hutan dan lahan disekitar kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI). Masyarakat masih memiliki kebebasan untuk membuka lahan perladangan baru di beberapa areal yang berdekatan dengan tapak pabrik dan HTI. Satu-satunya faktor rasional yang berpengaruh terhadap sikap negatif masyarakat hanyalah rendahnya bantuan atau kontribusi perusahaan terhadap masyarakat. Walaupun pihak manajemen perusahaan (khususnya HUMAS PT IIU/TPL) menyatakan telah menyalurkan dana yang cukup terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat namun ternyata tidak dinikmati oleh masyarakat.

Tabel 1. Korelasi Sederhana Faktor-faktor Rasional Terhadap Pembentukan Sikap

Variabel Bebas (X)	Sikap (Y)
Tingkat Pengetahuan (X1)	0,018
Sig. (2-tailed)	0,862
Akses SDA (X2)	0,126
Sig. (2-tailed)	0,223
Tingkat Kerugian (X3)	0,109
Sig. (2-tailed)	0,291
Bantuan (X4)	0,408
Sig. (2-tailed)	0,000

Sumber: Hasil Analisis



Gambar 4. Diagram Tanggapan Masyarakat Tentang Intensitas Kerugian

Sebagian besar dana jatuh ke pihak-pihak yang tidak berhak menerima, seperti organisasi-organisasi kepemudaan dan elit pemerintah maupun masyarakat.

Faktor lain yang memiliki hubungan dalam pembentukan sikap negatif masyarakat adalah faktor irasional, yakni etnosentrisme, kecemburuan, solidaritas dan prasangka. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi perilaku orang Batak Toba dalam kehidupan sehari-hari. Selain memiliki prinsip hidup Hamoraon (kekayaan), Hagabeon (kebesaran) dan Hasangapon (kebijaksanaan) dan memiliki struktur sosial Dalihan Na Taolu yang berisi nilai-nilai hidup yang tampak (*overt culture*) orang Batak Toa juga dipengaruhi oleh *covert culture*, yakni nilai-nilai budaya laten yang sering kali lebih berpengaruh. Budaya laten tersebut sering disingkat dengan HOTEL (*hossom, teal, elat dan late*). Makna yang dikandung istilah tersebut pada intinya adalah kedengkian, kecemburuan dan prasangka terhadap pihak lain, khususnya yang dianggap lebih berhasil dalam status sosial ekonomi. Berlandaskan budaya laten tersebutlah maka dilakukan pengujian terhadap faktor irasional dalam pembentukan sikap masyarakat.

Hasil pengujian keempat faktor irasional tersebut ternyata menunjukkan hasil yang signifikan dalam membentuk sikap negatif masyarakat.

Selama konflik berlangsung memang ada beberapa pihak yang menghubungkan penolakan masyarakat terhadap faktor nilai-nilai budaya Batak Toba. Hotman Siahaan pernah membuka suatu wacana baru yang selama konflik berlangsung tidak mendapat perhatian serius dari pihak-pihak yang bersengketa. Ia menilai telah terjadi marginalisasi terhadap nilai-nilai budaya masyarakat lokal oleh budaya industri yang dibawa oleh perusahaan. Masing-masing budaya memiliki kepentingan yang berbeda satu sama lain sehingga dapat menimbulkan sumber konflik.

Melalui proses pengujian, terlihat bahwa faktor etnosentrisme, kecemburuan, solidaritas dan prasangka memiliki hubungan dengan sikap negatif masyarakat. Berdasarkan fakta tersebut, jika dihubungkan dengan teori Lewis Coser maka konflik antara masyarakat dengan PT IIU/ TPL merupakan konflik yang bersifat realistik. Faktor yang dianggap lebih berpengaruh terhadap perlawanan dan penolakan masyarakat ternyata tidak terbukti. Penolakan masyarakat ternyata tidaklah berdasarkan pada masalah kerusakan lingkungan dan kerugian yang diakibatkan oleh operasional perusahaan namun telah bergeser pada hal-hal di luar konflik, yakni etnosentrisme, kecemburuan, solidaritas dan prasangka.

Tabel 2. Korelasi Faktor Irasional Terhadap Pembentukan Sikap Negatif Masyarakat

Faktor Bebas (X)	Sikap (Y)
Etnosentrisme (X5)	0,539
Sig. (2-tailed)	0,000
Kecemburuan (X6)	0,537
Sig. (2-tailed)	0,000
Solidaritas (X7)	0,428
Sig. (2-tailed)	0,000
Prasangka (X8)	0,281
Sig. (2-tailed)	0,539

Sumber: Hasil Analisis

2. Faktor Yang Berhubungan dengan Alternatif Penyelesaian Konflik

Salah satu pendekatan penyelesaian konflik yang mulai banyak digunakan pada saat ini adalah mekanisme Alternatif Penyelesaian Konflik (APK) atau Alternative Dispute Resolution (APK). Pendekatan ini dianggap memiliki kelebihan dibandingkan pendekatan administratif, politis maupun yuridis. Selain dari segi waktu lebih pendek, pendekatan ini lebih mampu mengakomodasi berbagai kepentingan sehingga melahirkan kesepakatan yang bersifat Win-win Solution. Faktor rasional dan irasional dalam penelitian ini dihubungkan dengan APK adalah untuk melihat kemungkinan penyelesaian berdasarkan suatu pendekatan yang lebih fleksibel dan mengutamakan kepercayaan dalam penyelesaian konflik.

Keempat faktor rasional tersebut ternyata tidak memiliki hubungan dengan pendekatan penyelesaian konflik alternatif (APK). Hal ini menunjukkan bahwa faktor tingkat pengetahuan, akses pada sumberdaya alam, tingkat kerugian dan bantuan bukanlah menjadi penyebab kebuntuan penyelesaian konflik. Hampir sama dengan faktor pembentuk sikap masyarakat, faktor irasional selama ini dianggap sebagai dasar penolakan masyarakat terhadap perusahaan ternyata sama

sekali tidakberhubungan denganketidakhungkinan penyelesaian konflik.

Kondisi tersebut ternyata berbeda ketika faktor irasional dihubungkan dengan pendekatan APK. Keempat faktor irasional ternyata terlihat memiliki hubungan dengan kebuntuan penyelesaian.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidaklah mempersoalkan lagi tentang alasan-alasan rasional yang selama ini dijadikan perdebatan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah dan pihak perusahaan. Berbagai janji yang dikemukakan oleh pihak perusahaan, seperti mengintroduksi paradigma batu PT IIU/TPL dalam pengelolaan lingkungan dan janji perbaikan hubungan masyarakat melalui pendirian yayasan yang akan mengelola 1% dari biaya produksi perusahaan dalam satu tahun ternyata tidak mendapat tempat pada masyarakat. Masyarakat sudah tidak memiliki kepercayaan kepada perusahaan dan pemerintah yang berupaya mengoperasikan kembali perusahaan.

Faktor yang lebih memiliki hubungan atas ketidakhungkinan penyelesaian konflik melalui pendekatan APK adalah faktor-faktor irasional. Melalui penuturan yang dapat direkam dari masyarakat, mereka tidak peduli dengan paradigma baru dan konsep-konsep pengelolaan yang dikemukakan perusahaan.

Tabel 3. Korelasi Sederhana Faktor-faktor Rasional Terhadap Pembentukan Sikap

Variabel Bebas (X)	Sikap (Z)
Tingkat Pengetahuan (X1)	-0,027
Sig. (2-tailed)	0,796
Akses SDA (X2)	-0,174
Sig. (2-tailed)	0,092
Tingkat Kerugian (X3)	-0,160
Sig. (2-tailed)	0,121
Bantuan (X4)	-0,141
Sig. (2-tailed)	-0,170

Sumber: Hasil Analisis

Tabel 4. Korelasi Faktor Irasional Terhadap Pembentukan Sikap Negatif Masyarakat

Faktor Bebas (X)	Sikap (Z)
Etnosentrisme (X5)	-0,309
Sig. (2-tailed)	0,002
Kecemburuan (X6)	-0,300
Sig. (2-tailed)	0,003
Solidaritas (X7)	-0,285
Sig. (2-tailed)	0,005
Prasangka (X8)	-0,249
Sig. (2-tailed)	0,015

Sumber: Hasil Analisis

Kebohongan-kebohongan yang selama ini pernah dilakukan pihak perusahaan sudah cukup menjadi pegangan bagi masyarakat untuk tidak mempercayai strategi apapun yang akan diterapkan, walaupun itu akan lebih menguntungkan masyarakat secara ekonomi. Bagi masyarakat, yang lebih penting dari segalanya adalah kembalinya kehidupan harmonis yang pernah mereka rasakan sebelum perusahaan beroperasi. Kehadiran PT IIU/TPL dianggap telah mengganggu kerukunan dan ketenangan masyarakat, dan terlebih telah merusak tatanan sosial dan budaya masyarakat lokal.

Teori Lewis Coser yang dijadikan dasar penelitian ini ternyata bukti. Konflik yang bersifat nonrealistis ternyata memiliki hubungan terhadap ketidaktunggalan penyelesaian konflik, karena yang menjadi akar persoalan bukanlah substansi dari munculnya konflik, namun sudah keluar dari frame konflik. Ketika kondisi tersebut terjadi, maka akan sulit untuk dicarikan solusi yang paling tepat. Masyarakat sudah tidak memiliki kepercayaan yang cukup kepada pihak perusahaan dan pemerintah untuk menyelesaikan konflik. Padahal, dalam pendekatan APK, kepercayaan merupakan syarat utama dalam tahap awal penyelesaian. Berlangsungnya dialog-dialog dalam penyelesaian konflik akan terhambat bahkan tidak terjadi sama sekali jika tidak ada kepercayaan antar pihak yang berkonflik terutama di masyarakat.

3. Penerapan Alternatif Penyelesaian Konflik (APK) Berdasarkan Sikap Negatif Masyarakat.

Sikap negatif masyarakat terhadap PT IIU/TPL selama ini telah dianggap menjadi dasar kebuntuan penyelesaian konflik. Masyarakat sudah sangat membenci eksistensi perusahaan tersebut di Sosorladang sehingga beberapa pendekatan penyelesaian konflik yang pernah dilaksanakan tidak mampu merubah padangan masyarakat untuk dapat menerima kembali operasional PT IIU/TPL di wilayah Porsea. Melalui pengujian dan informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian, masyarakat pada umumnya sudah sulit untuk menerima keberadaan perusahaan. Walaupun ada kelompok-kelompok masyarakat yang lokasinya berada jauh dari tapak pabrik menerima reoperasional pabrik, namun masyarakat di Sosorladang sendiri tetap pada pendirian menolak rencana-rencana pengaktifan kembali perusahaan.

Ada yang menarik dari hasil penelitian ini perihal sikap penolakan masyarakat terhadap kemungkinan penyelesaian konflik melalui pendekatan APK. Walaupun terbukti bahwa masyarakat menolak reoperasional perusahaan, namun hubungan tersebut tidaklah kuat.

Tabel 5. Korelasi Variabel Sikap Terhadap APK Correlations

		Y	Z
Y	Pearson Correlation	1,000	-,326**
	Sig. (2-tailed)	,	,001
	N	95	95
Z	Pearson Correlation	-,326**	1,000
	Sig. (2-tailed)	,001	,
	N	95	95

**Correlation is significant at the 0.01 level

Hubungan yang bersifat negatif tersebut mengartikan bahwasanya sikap negatif masyarakat Sosorladang benar-benar memiliki hubungan dengan ketidakmungkinan penyelesaian konflik. Fakta tersebut juga memiliki makna bahwa masyarakat memiliki persepsi negatif bahwasanya konflik dapat diselesaikan dengan akhir pembukaan kembali operasional pabrik. Kebencian masyarakat pada perusahaan dan pihak-pihak yang dianggap memiliki hubungan pada PT IIU/TPL menjadi dasar penolakan pembukaan kembali perusahaan.

Hubungan antara sikap negatif terhadap ketidakmungkinan penyelesaian konflik ternyata tidaklah kuat. Selain fakta tersebut bersumber dari hasil uji statistik, hasil pengamatan dan wawancara dengan masyarakat juga menunjukkan kondisi yang sama. Ketidakpercayaan dan keengganan masyarakat terhadap perusahaan dan untuk berdialog dengan pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian konflik bukanlah semata-mata disebabkan sikap negatif masyarakat. Ada faktor lain yang sebenarnya lebih berperan namun sulit untuk diidentifikasi sebagai penyebab keengganan masyarakat untuk berdialog dengan pihak perusahaan dan pemerintah dalam menyelesaikan konflik. Faktor tersebut adalah adanya kondisi traumatik di kalangan masyarakat atas benturan dan disharmonisasi tatanan sosial masyarakat pada masa lalu. Kondisi tersebut masih membekas dan membawa ketakutan yang besar pada masyarakat. Warga menjadi enggan untuk berkomentar dan mengungkit konflik yang dianggap menjadi penyebab kerusuhan sosial. Untuk menghindari terulangnya benturan tersebut, masyarakat lebih memilih pasif dan menjauhi polemik tentang keberadaan PT IIU/TPL di Porsea.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu dari hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, maka adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hanya faktor irasional, yakni etnosentrisme, kecemburuan, solidaritas dan prasangka yang membentuk sikap negatif masyarakat terhadap PT IIU/TPL, sedangkan pada faktor rasional hanyalah faktor penerimaan bantuan.
2. Berdasarkan hasil pengujian statistik dan informasi dari responden, faktor rasional yang berhubungan kuat dengan pembentukan sikap masyarakat adalah faktor penerimaan bantuan, karena hanya faktor tersebutlah yang memiliki hubungan dengan pembentukan sikap negatif masyarakat, sedangkan pada faktor irasional, faktor etnosentrismelah yang memiliki hubungan paling kuat terhadap pembentukan sikap negatif masyarakat.
3. Konflik antara masyarakat dengan perusahaan adalah bersifat konflik nonrealistis, sebab faktor-faktor irasional yang lebih memiliki hubungan dengan pembentukan sikap masyarakat, sedangkan pada faktor rasional hanyalah pada faktor penerimaan bantuan.
4. Ketidakmungkinan penyelesaian konflik antara masyarakat dengan PT IIU/TPL lebih dipengaruhi oleh faktor irasional, sedangkan faktor-faktor rasional tidak berhubungan sama sekali. Hal ini membuktikan bahwasannya konflik yang bersifat nonrealistik merupakan penyebab tidak dimungkinkannya penyelesaian konflik.

5. Sikap negatif masyarakat ternyata memiliki hubungan dengan ketidakmungkinan penyelesaian konflik antara masyarakat dengan PT IIU/TPL. Pembuktian ini jelas menunjukkan bahwa sikap negatif masyarakat merupakan sumber tidak terselesaikannya konflik. Tanggapan-tanggapan dari masyarakat terhadap perusahaan, pemerintah dan aspek-aspek yang mendukung penyelesaian konflik ternyata bersifat negatif, sehingga menyebabkan pendekatan Alternatif Penyelesaian Konflik (APK) tidak relevan untuk diterapkan. Sikap masyarakat menunjukkan penolakan jika konflik diselesaikan melalui pendekatan APK.

B. Saran

Konflik yang berlangsung antara masyarakat Sosorladang dan umumnya masyarakat Porsea merupakan konflik nonrealistis, sebab ternyata faktor yang lebih mempengaruhi pembentukan sikap negatif masyarakat adalah faktor-faktor irasional, yakni; etnosentrisme, kecemburuan, solidaritas dan prasangka. Perdebatan tentang penyebab perlawanan dan penolakan masyarakat ternyata salah tempat. Artinya, yang menjadi dasar kebencian masyarakat pada PT IIU/TPL bukanlah dampak perusahaan pada lingkungan, kerugian yang diderita masyarakat ataupun terbatasnya akses masyarakat terhadap sumberdaya alam.

Berdasarkan hal itu, keberadaan industri haruslah mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal. Jika terjadi marginalisasi terhadap nilai-nilai tersebut, maka konsekuensinya sangat berat. Bukan saja pengkritisan atas kinerja sebuah industri dan dampaknya terhadap lingkungan hidup yang akan muncul, namun dapat berakhir dengan penolakan terhadap eksistensi sebuah industri. Ketika kondisi itu terjadi dan telah menyentuh keberadaan sebuah entitas budaya, maka proses penyelesaian konflik akan semakin sulit.

Walaupun sulit untuk menyelesaikan sebuah konflik yang bersifat nonrealistis, namun minimal pihak-pihak yang memiliki keinginan dan otoritas penyelesaian konflik dapat memiliki pegangan dalam menyelesaikan konflik sumberdaya alam. Fokus penyelesaian tidak hanya cukup dengan memunculkan konsep-konsep ekonomi dan bio-fisik belaka. Jika konflik sumberdaya alam sudah bersifat nonrealistis, maka titik berat penyelesaian harus adalah pada faktor-faktor yang bukan merupakan substansi konflik. Kemampuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor tersebut akan memudahkan langkah rekonsiliasi antara sebuah industri dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Cormick, Gerald, Norman Dale, Paul Emond, S., Genn Sigurdson, dan Barry D. Stuart, 1996. *Building Consensus for a Sustainable Future, Putting Principles into Practice*. Natural Round Table on The Environment and Economy, Ottawa, Toronto.
- Fisher, Simon, Jawe Ludin, Steve Williams, Dekhan Ibrahim Abdi, Richard Smith, dan Sue Williams. 2000. *Mengelola Konflik, Ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak*. The British Council, Jakarta.
- Coser, Lewis. 1956. *The Functions of Sosial Conflict*. The Free Press, New York.
- Vredendregt, Jacob. 1978. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. PT. Gramedia Jakarta.
- Folger, Joseph P. and Marshal Scott Poole, 1984. *Working Through Conflict, A Communication Perspective*, Scott Foresman and Company Glenview, Illinois, USA.
- Rachbini, Didik, J. 1990, "Petani, Pertanian Subsisten dan Kelembagaan Tradisional, Suatu Tinjauan Teoritis" *Prisma*, 3, 65-73.
- Johnson, Paul Doyle. 1990. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Nurdu'A, M. Arief dan Nursyam B. Sudharsono. 1991. *Aspek Hukum Penyelesaian Masalah dan Kerusakan Lingkungan Hidup*. Satya Wacana, Semarang.
- Dixon, Thomas F, Homer, 1991. "Environmental Changes as Causes of Accute Conflict". *International Security*, 16, 76-116.
- Ghai, Dharam. 1994. "Environment Livelihood and Powerment", *Development and Change*, 25, 1-11.
- Colchester, Marcus. 1994, "Sustaining The Forests: The Community Based Approach in South and South East Asia", *Development and Change*, 25, 69-93.
- Abimanyu, Anggito dan Poppy Ismalina, 1995. "Ekonomi Global dan Dampak Lingkungan". Makalah pada Seminar Nasional Lingkungan Hidup Setrajana. Fakultas Fisipol, Universitas Gadjah Mada.
- Rahail, J.P. 1995, "Kearifan Budaya Masyarakat Lokal Melestarikan Lingkungan Hidup", *CSIS*, 6, 417-420.

Sumber Konflik

- Kusumaatmadja, Sarwono. 1995. "Sumbangan Kearifan Tradisional Terhadap Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup: Sebuah Pengantar", CSIS, 6, 413-416.
- Yazid, TM., Luthfi, 1995. *Mendayagunakan ADR dalam Sengketa Lingkungan Hidup*, Yogyakarta Institute For Environmental Research, Yogyakarta.
- Suharko, 1997. "Industri, Dampak Lingkungan dan Konflik Sosial, Analisis Data Sekunder Terhadap Hasil Monitoring Lingkungan Perusahaan Pertambangan Unocal Kaltim", Laporan Penelitian. Jurusan Sosiologi FISIP-UGM.
- Usman, Sunyoto. 1998. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Keraf, Sony. 2000. "Intervensi Negara dalam Penyelesaian Konflik Lingkungan Hidup". Makalah pada Seminar Nasional Penyelesaian Konflik dengan Pendekatan Tepat Guna, PPLH LP-UII. Yogyakarta.
- Mitchell, Bruce, B. Setiawan, dan Dwita Hadi Rahmi. 2000. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- American Arbitration Association (AAA), 2000. *A. Beginners Guide To Alternative Dispute Resolution*, <http://www.adr.org>
- Hardjosoemantri, Koesnadi. 2000. *Hukum Tata Lingkungan*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Margono, Suyud. 2001. *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Simanjuntak, B.A. 2001. *Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba*. Jendela, Yogyakarta.

Media Surat Kabar

- Ozon, Vol. 2 No. 8, Mei 2001
- Realita Pos, Kamis, 21 Desember 1998
- Gema Reformasi, Minggu Ke-IV, Nopember 1998
- Harian Sinar Indonesia Baru, 1 September 1998